

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap tahun, setiap bulan, bahkan setiap hari kemiskinan terjadi disekitar kita. Sadar atau tidak, kemakmuran dan kemiskinan seringkali berdampingan di suatu daerah (wilayah) bahkan di suatu Negara yang kaya (maju) sekalipun. Masalah kemiskinan sering dijumpai pada Negara yang jumlah penduduknya banyak. Negara-negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia adalah China, India, dan Amerika Serikat, yang disusul dengan peringkat keempat yaitu Negara Indonesia. Negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan memiliki kualitas hidup yang rendah maka akan mengakibatkan beban tersendiri bagi Negara itu.

Di Indonesia sendiri masalah kemiskinan adalah suatu masalah yang selalu terjadi dari masa kemasa yang menjadi perhatian utama, karena kemiskinan akan selalu dikaitkan dengan kesenjangan pada masyarakat dimana ada perbandingan si kaya dengan si miskin (Ishatono & Raharjo, 2016). Semua upaya pembangunan terus dilakukan pemerintah, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Hal itu dilakukan untuk menurunkan tingkat angka kemiskinan yang ada, tetapi kenyataan masalah ini belum terselesaikan secara tuntas khususnya Negara berkembang seperti Negara Indonesia (Azizah E , 2018).

Salah satu persoalan yang mendasar dan menjadi masalah yang sulit untuk diatasi oleh seluruh Negara yang ada di dunia termasuk Indonesia adalah kemiskinan. Hal itu karena kemiskinan mempunyai sifat yang kompleks artinya kemiskinan tidak muncul secara tiba-tiba tetapi kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai latar belakang yang ada (Parwa & Yasa, 2019). Istilah kemiskinan muncul ketika masyarakat tidak dapat mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang sesuai dengan standar hidup yang ada. Kemiskinan dalam arti sebenarnya dapat dipahami sebagai suatu kondisi dimana seseorang

kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Salah satu penyebab terjadinya masalah kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan aset seseorang untuk (diterima) memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, status kesehatan dan pendidikan (Azizah E et al., 2018).

Di Indonesia masalah kemiskinan sudah diatur pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara republik indonesia tahun 1945 pada ayat 1 pasal 34 yang berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Dengan adanya undang undang tersebut, Negara mempunyai kewajiban dalam meningkatkan kesejahteraan setiap warga Negara dari kondisi kekafiran dan kemiskinan. Adapun dalil Al-Quran yang sesuai dengan hal itu terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 215 yang artinya :

*“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. " Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 215)*

Kemiskinan juga sering diturunkan dari orang tua kepada anaknya, karena keterbatasan (tidak mampu) keluarga miskin dalam membiayai pendidikan dan kesehatan yang baik bagi anak-anak mereka. Bagi mereka yang keluarganya sangat miskin, memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesejahteraan yang layak menjadi tantangan yang sangat besar, itu karena tingginya biaya transportasi, peralatan sekolah, dan layanan kesehatan sehingga membuat mereka sulit untuk menjangkaunya.

Provinsi Jambi merupakan salah satu dari 34 provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan yang bisa dikatakan cukup tinggi. Kota Jambi merupakan salah satu kota yang ada di provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Persentase tingkat kemiskinan yang ada di Kota Jambi pada tahun 2014-2021 mengalami fluktuasi namun secara relatif mengalami penurunan dari tahun 2015-2019. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Dan Persentase Kemiskinan Kota Jambi Tahun 2014-2021**

Tahun	Jumlah penduduk miskin (Jiwa)	Persentase kemiskinan (%)
2014	50.950	8,97
2015	55.510	9,63
2016	51.610	8,84
2017	52.080	8,81
2018	50.610	8,46
2019	48.950	8,20
2020	50.440	8,25
2021	54.230	8,70

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi data diolah

Konsep pembangunan ekonomi menurut perspektif islam berbeda dengan pembangunan dalam perspektif konvensional. Dalam perspektif islam tujuan dari pembangunan adalah untuk mencapai kesejahteraan dunia dan juga akhirat (falah). Didalam islam yang menjadi dasar pembangunan suatu Negara ialah manusia, manusia merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan, karena manusia yang akan menjadi penggerak dari sebuah Negara.

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk kemajuan suatu Negara. Menurut Widodo et al., (2011) Negara yang dianggap maju tidak hanya dihitung berdasarkan produk domestic bruto (PDB), tetapi juga memperhitungkan aspek usia harapan hidup dan tingkat pendidikannya. Hal itu berdasarkan pada paradigma Human Centered Development, paradigm pembangunan yang muncul dan berkembang pada tahun 1990-an. (Baeti et al., 2013) juga berpendapat bahwa United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan pembangunan manusia sebagai proses memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Diantara sekian banyaknya pilihan, yang terpenting adalah pilihan untuk berumur panjang, pilihan untuk berilmu, dan pilihan untuk mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk kehidupan yang layak.

Pembangunan manusia dapat menggambarkan peningkatan terhadap perkembangan manusia. Indeks pembangunan manusia (IPM) atau

dikenal juga dengan sebutan Human Development indeks (HDI) digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan dengan membandingkan nilai harapan hidup, nilai tingkat pendidikan, dan nilai pendapatan per kapita riil, atau mengukur nilai salah satu aspek penting yang terkait dengan kualitas hasil pembangunan ekonomi, yaitu kualitas pembangunan manusia.

UNDP memperkenalkan indeks pembangunan manusia sebagai salah satu alat ukur yang telah disepakati di dunia berdasarkan peringkatnya, jika ditinjau dari segi ekonomi islam tentunya ini belum komprehensi dalam mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu Negara. Indikator-indikator yang digunakan dalam segi ekonomi konvensional masih berkaitan dengan pencapaian kesejahteraan material dan sosial. Sedangkan dalam kaitannya dengan ekonomi islam, islam sebagai agama telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dalam tuntutan kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksud bukan hanya untuk didunia saja melainkan juga di akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 172 yang artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” (QS. Al-Baqarah: 172)*

Dalam pandangan islam, pembangunan ekonomi juga memfokuskan pada keadilan sosial dan juga memperhatikan kesejahteraan manusia. Dalam pandangan islam pembangunan menitikberatkan pada tujuan yang paling utama , yaitu maqasid syari’ah yang memiliki tiga tujuan dasar yang pertama yaitu pendidikan, kedua penegakan keadilan dan yang ketiga yaitu menjamin kesejahteraan manusia atau sering disebut masalah. Menurut konsep islam berdasarkan maqashid syari’ah, pembangunan manusia menitikberatkan pada dua aspek, material dan moral. Dalam islam hanya ada dua kebutuhan manusia, yang pertama bersifat duniawi, yaitu untuk pemanfaatan konsumsi yang sifatnya materi dan fasilitas untuk memproduksi (menghasilkan) sebanyak-banyaknya, yang kedua bersifat spiritual dalam aspek moral, etika dan kehidupan sosial.

Dalam islam pengukuran pembangunan manusia menggunakan pendekatan maqasid syari’ah sudah banyak dikemukakan oleh pemikir islam,

dimana ulama klasik khususnya Al-Ghazali dan Al-Syatibi merangkum dalam lima penjagaan utama dalam kehidupan (al-kulliyah al-khamsah) yaitu *Ad-Dein* (menjaga agama), *An-Nafs* (menjaga jiwa), *Al-., aql* (menjaga akal), *Al-Nasl* (menjaga keturunan), dan yang terakhir adalah *Al-Maal* (menjaga harta)

Penghitungan *Human Development Index* (HDI) menggunakan tiga indikator yaitu indikator pertama tingkat kehidupan, kedua harapan hidup, dan yang terakhir pendapatan perkapita. Untuk pengukuran *Islamic Human Development Index* (IHDI) yang diambil dari pendekatan maqasid syari'ah terdapat tambahan indikator yang digunakan yaitu tingkat religiusitas pada aspek *hifzu ad-dein* yang digunakan adalah tingkat persepsi korupsi (*corruption perception index*) dan juga tingkat kejahatan kriminalitas (*total crime index*) di suatu daerah yang ingin diukur. Pengukuran I-HDI pernah dikaji oleh Hendri Anto Mb tahun 2010 dengan menggunakan indikator HDI secara umum dan menambah indikator dari pendekatan maqashid syari'ah al-ghazali, dengan sampel penelitian yang digunakan yaitu anggota Negara-negara *Organisation Islamic Countries* (OIC).

Sejalan dengan tren pembangunan, HDI saat ini dianggap menjadi salah satu cara pandang yang memberikan gambaran yang lebih baik tentang tingkat pertumbuhan (perkembangan) dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran zakat bisa menjadi sarana pembangunan manusia, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam. Irfan Syauqi Beik, (2009) menyatakan bahwa konsep zakat pada hakikatnya memiliki tiga dimensi utama, yaitu dimensi spiritual personal, dimensi sosial dan dimensi ekonomi. Didalam undang-undang nomor 23 tahun 2011, salah satu tujuan penyelenggaraan zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq (orang yang menerima zakat), dan hal ini tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang ada, yang diukur dengan menggunakan *intrument Human development index*.

Dalam perspektif ekonomi islam, instrument yang dapat mempengaruhi pembangunan manusia adalah zakat. Semakin meningkat jumlah zakat, maka dapat meningkatkan taraf hidup manusia. Data indeks pembangunan, penerimaan zakat, di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini :

**Tabel 1.2 Zakat, Index IPM dan I-HDI**

<b>Tahun</b>	<b>Zakat (Rp)</b>	<b>Indeks Pembangunan manusia (IPM) (%)</b>	<b>I-HDI (%)</b>
2015	1.039.771.309	75,58	91,76
2016	1.522.421.594	76,14	83,26
2017	2.520.123.123	76,74	78,41
2018	3.177.440.145	77,41	75,25
2019	5.252.167.212	78,26	66,94
2020	6.547.519.664	78,37	49,84
2021	6.743.968.338	79,12	45,76

*Sumber: BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Jambi, BPS Provinsi Jambi/12022, Hasil perhitungan I-HDI*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan indeks pembangunan manusia di Kota Jambi mengalami kenaikan setiap tahunnya dan diikuti dengan naiknya zakat di Kota Jambi Sedangkan I-HDI mengalami penurunan setiap tahunnya.

Hal itu terjadi karena, zakat berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut Pramik (1992), zakat dapat mempengaruhi investasi, konsumsi, produksi dan tabungan. Dari sisi investasi, zakat dapat menjadi sumber dana produktif untuk mengembangkan usaha mikro mustahik (penerima zakat). Perkembangan usaha mikro dapat membantu perekonomian Indonesia dan relatif lebih tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi. Dari sisi konsumen, penyaluran dana zakat dapat mendorong peningkatan agregat. Peningkatan permintaan agregat akan mendorong peningkatan pada sisi penawaran. Sehingga perekonomian di Negara tersebut dapat tumbuh.

Tujuan jangka panjang penyaluran dana zakat adalah untuk menyediakan peralatan atau modal usaha yang produktif sehingga dapat digunakan secara terus menerus dan memberikan manfaat ekonomi dan peningkatan pendapatan manusia. Sehingga dengan penyaluran dana zakat diharapkan masyarakat yang dulunya sebagai mustahiq (penerima zakat) dapat menjadi muzakki (pemberi zakat) (Lubis & Dean Amri, 2021).

Dari penjelasan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji variabel penelitian independen yaitu zakat dan kemiskinan terhadap variabel dependen yaitu Islamic Human Development Index (I-HDI) dan melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH ZAKAT DAN KEMISKINAN TERHADAP ISLAMIC HUMAN DEVELOPMENT INDEX (I-HDI) TAHUN 2012-2021”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pencapaian tingkat kesejahteraan penduduk Kota Jambi berdasarkan *Islamic Human Development Index* (I-HDI)
2. Bagaimana pengaruh zakat dan kemiskinan terhadap I-HDI di Kota Jambi
3. Bagaimana trend zakat, kemiskinan dan I-HDI di Kota Jambi

## **1.3 Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pencapaian tingkat kesejahteraan penduduk Kota Jambi berdasarkan *Islamic Human Development Index* (I-HDI)
2. Mengetahui pengaruh zakat dan kemiskinan terhadap I-HDI di Kota Jambi
3. Mengetahui trend zakat, kemiskinan dan I-HDI di Kota Jambi

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penelitian selanjutnya yang meneliti judul yang terkait dengan *Islamic Human Development Indeks* (I-HDI), zakat, dan kemiskinan di Kota Jambi

2. Bagi pemerintah daerah Kota Jambi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam menciptakan strategi untuk meningkatkan *islamic indeks* pertumbuhan manusia di Kota Jambi
3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi syarat dalam mendapatkan gelar sarjana sekaligus menjadi sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama proses pembelajaran di Universitas Jambi pada Program Studi Ekonomi Dan Bisnis Prodi Ekonomi Islam.



